



Jurnal Multidisiplin Indonesia

Journal homepage: <https://jmi.rivierapublishing.id/>

ISSN xxxx-xxxx E-ISSN xxxx-xxxx

ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PADA KANTOR KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019

Nur Adhitya Ningsih

Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Indonesia

nuradhitya.n99@gmail.com

Riwayat Artikel:

Received: 06-09-2022

Revised: 14-09-2022

Accepted: 29-09-2022

Keywords: *Lakip, Performance and Accountability*

Kata Kunci: *Lakip, Kinerja, Dan Akuntabilitas*

Abstract

This Kapuas District performance report 2019 is an accountability report for the achievement of the Kapuas District vision and mission towards good government. LAKIP, Kapuas District Sanggau District has complied with the guidelines in government regulation number 29 Of 2014.

The arrangement of this annual performance report contains information about the planning and annual performance achievement. All successes and failures in achieving strategic goals and objectives are described briefly and clearly. Determination in the presentation of the budget realization report for the government in the context of the realization of the fulfillment of the objectives of public accountability at the Kapuas District Office Sanggau. The type of research used is the descriptive qualitative research method. Data source using primary data. Data collection techniques used are interviews and documentation. The data analysis technique used is divided into four parts, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the achievement of the performance and budget of the Kapuas District Office, Sanggau Regency has been going well and is categorized with moderate criteria.

Abstrak

Laporan kinerja Kecamatan Kapuas Tahun 2019 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Kecamatan Kapuas menuju pemerintah yang baik. LAKIP kantor Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau telah sesuai dengan pedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014. Penyusunan laporan kinerja tahunan menyajikan laporan tentang perencanaan dan capaian kinerja tahunan. Penelitian ini bertujuan mengetahui ketercapaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat Deskriptif. Sumber data menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dibagi menjadi empat bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketercapaian kinerja keuangan di Kantor Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau telah berjalan dengan baik dan dikategorikan dengan kriteria sedang.

Corresponding Author: Nur Adhitya Ningsih

E-mail: nuradhitya.n99@gmail.com



PENDAHULUAN

Manajemen berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan pada dasarnya bukan sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, akan tetapi lebih dari itu. Esensi dari manajemen berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan laporan, dimana program/kegiatan dan sumber daya (anggaran) adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran (output), hasil (outcome) maupun dampak (impact).

Pendekatan manajemen berbasis kinerja adalah sejalan dengan prinsip good governance di salah satu pilarnya yaitu Akuntabilitas. Akuntabilitas menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam rangka pengendalian dan pertanggungjawaban atas program atau kegiatan pemerintah daerah guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pengukuran guna mengetahui sampai sejauh mana capaian dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis. Dari hasil pengukuran tersebut dilakukan penilaian dengan mengacu Kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penilaiannya dengan Kriteria Penilaian Kinerja sebagaimana diuraikan pada tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Penilaian Kinerja

No	Jumlah Capaian Kinerja %	Interprestasi
1	≥ 91	Sangat Tinggi
2	$\geq 76 - 90,99$	Tinggi
3	$\geq 66 - 75,99$	Sedang
4	$\geq 51 - 65,99$	Rendah
5	$\leq 50,99$	Sangat Rendah

Sumber : Kantor Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 2019

Capaian indikator kinerja merupakan tingkat atau ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja berdasarkan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (Target).

Penyusunan laporan kinerja tahunan Kecamatan Kapuas merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Kecamatan Kapuas menuju pemerintahan yang baik atau good governance dengan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Kapuas. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan peraturan Bupati Sanggau Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau.

Secara garis besar penyusunan laporan kinerja tahunan ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahunan. Segala keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis diuraikan secara singkat dan jelas. Selain itu, diuraikan juga dari aspek keuangan mengenai penggunaan anggaran dikaitkan dengan hasil yang diharapkan sesuai sasaran strategis yang ditetapkan. Maka dalam penyajian laporan keuangannya juga menyajikan laporan realisasi anggaran yang disusun dengan sebagaimana mestinya.

Penetapan standar laporan realisasi anggaran adalah penetapan dasar-dasar dalam penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka sebagai perwujudan untuk pemenuhan tujuan akuntabilitas publik. Dengan adanya pelaporan realisasi anggaran tersebut dapat dilihat perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Perbandingan tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauhmana tingkat pencapaian target-target yang telah ditetapkan guna untuk memprediksikan sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang secara komparatif.

Pencapaian good governance, untuk itu dibutuhkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di kantor Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan visi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dan ditetapkan melalui seperangkat indikator kinerja atau alat pertanggungjawaban secara periodik. Mengingat pentingnya pencapaian tujuan suatu instansi tersebut setiap pimpinan dan pegawai perlu

meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Susan Susanto (2013) menyatakan akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana Instansi Pemerintah telah menerapkan sistem manajemen kinerja dan pengendalian mutunya dengan baik maka sebaiknya dilakukan pelaksanaan LAKIP. Ini diperlukan dengan mengasumsikan bahwa jika sistem LAKIP berjalan dengan baik, maka akan dapat mewujudkan hasil yang baik. Instansi pemerintah sudah selalu memperbaiki manajemen kinerjanya agar dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya, walaupun belum diketahui sejauh mana keberhasilan instansi tersebut meraih output yang diharapkan.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan pada Kecamatan Kapuas guna mendukung terwujudnya visi “Sanggau Maju dan Terdepan”, telah disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kapuas Tahun 2019-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Camat Kapuas Nomor 06 Tahun 2019. Renstra tersebut merupakan landasan dan arah bagi unit kerja organisasi Kecamatan Kapuas yang secara umum menjadi indikator capaian kinerja untuk periode tahun 2019-2024. Renstra juga merupakan langkah awal dan dasar dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian sasaran strategis dalam waktu 5 tahun (2019 – 2024) pada Kantor Kecamatan Kapuas sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2019 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Data APBD Kantor Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran	(%)
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 5.795.540.059	75,67
2	Belanja Langsung	Rp. 7.852.725.174	46,86
	Jumlah	Rp. 13.648.265.233	59,09

Sumber : Kantor Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 2019

Dilihat dari tabel 2. Pada Tahun Anggaran 2019, Kantor Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau mendapatkan anggaran APBD sebesar Rp. 13.648.265.233, yang terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.7.852.725.174, dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.795.540.059.

Dengan jumlah anggaran yang cukup besar tersebut, maka dibutuhkan pengelolaan yang efektif dan efisien sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik karena ditunjang dengan alokasi dana yang memadai. Pengelolaan anggaran tersebut tentunya harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan faktual.

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan, penulis mencoba untuk meneliti laporan akuntabilitas kinerja dengan mengambil judul “Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Tahun 2019”. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penulisan adalah Untuk Mengetahui ketercapaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Pada Kantor Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

METODA PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat Deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Kecamatan Kapuas, yang beralamat di Jln. Jend Sudirman No. 16 Telp (0564) 21005 Kode Pos 78512, Kabupaten Sanggau Kecamatan Kapuas Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini dilakukan pada bulan November sampai Agustus Tahun 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah sumber data primer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah interview (wawancara) dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dibagi menjadi empat bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1) Data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1) Realisasi Anggaran

a. Realisasi Belanja Anggaran

Tabel 3. Laporan Realisasi Belanja Anggaran Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Belanja Tidak Langsung	Rp.5.795.540.059	Rp.4.385.277.263	75,67
2	Belanja Langsung	Rp.7.852.725.174	Rp.3.679.698.550	46,86
	Jumlah	Rp.13.648.265.233	Rp.8.064.975.813	59,09

Sumber : Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 2019

Berdasarkan tabel 3. diketahui realisasi belanja anggaran tahun 2019 sebesar Rp.13.648.265.233, di realisasi sebesar Rp. 8.064.975.813, atau 59,09% yang terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.795.540.059, dan di realisasi sebesar Rp. 4.385.277.263 atau 75,67%, dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.852.725.174 dan di realisasi sebesar Rp. 3.679.689.550 atau 46,86%.

Kesimpulannya laporan realisasi belanja anggaran tahun 2019 berjalan dengan baik dan mencapai kriteria sedang.

b. Realisasi Belanja Per Sasaran Strategis

Tabel 4.2

Laporan Realisasi Belanja Per Sasaran Strategis Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
1	Terpenuhinya barang-barang kebutuhan pengiriman surat dinas	Rp.4.950.000	Rp.4.248.000	85,8 2
2	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi penyediaan air bersih/penerangan	Rp.90.000.000	Rp.75.575.751	83,9 7
3	Terlaksananya penata usahaan keuangan kecamatan dengan baik	Rp.335.400.000	Rp.238.350.000	71,0 6
4	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	Rp.22.247.846	Rp.18.051.084	81,1 4
5	Berfungsinya peralatan kantor untuk melaksanakan aktifitas pelayanan	Rp.11.025.000	Rp.9.500.000	86,1 7
6	Terpenuhinya ATK sesuai dengan kebutuhan	Rp.107.113.711	Rp.107.113.711	100 1
7	Terpenuhinya barang cetak dan pengadaan	Rp.31.180.815	Rp.25.453.030	81,6 3
8	Terpenuhinya kebutuhan	Rp.7.645.000	Rp.5.288.000	69,1 7

	komponen alat listrik			
9	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.20.977.900	20.977.900	100
10	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan	Rp.3.840.000	Rp.3.840.000	100
11	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Rp.14.460.000	Rp.11.532.000	79,7 5
12	Tersedianya makanan dan minuman kantor kegiatan rapat dan tamu	Rp.80.290.000	Rp.59.525.000	74,1 4
13	Terlaksananya perjalanan dinas diluar daerah	Rp.119.750.000	Rp.109.865.90 0	91,7 5
14	Tersedianya tenaga kontrak	Rp.430.817.900	Rp.430.803.23 2	100
15	Terlaksananya perjalanan dinas didalam daerah	Rp.166.208.000	Rp.151.664.00 0	91,2 5

16	Meja dan kursi untuk kelancaran tugas pada kantor camat kapuas	Rp.63.090.000	Rp.63.090.000	100
17	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Rp.155.350.000	Rp.99.925.000	64,3 2
18	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	Rp.29.922.000	29.048.500	97,0 8
19	Tersediannya pegawai yang terampil dibidang kerjanya.	Rp.18.000.000	Rp.17.970.700	99,8 4

20	Terpenuhinya pelayanan administrasi kepada masyarakat	Rp.29.900.000	Rp.28.050.000	93,8 1
21	Masyarakat dikecamatan dapat terbina dengan baik	Rp.757.525.060	Rp.472.009.80 0	62,3 1
22	Terwujudnya pengelola keuangan desa dengan baik	Rp.52.100.000	Rp.45.300.000	86,9 5
23	Masyarakat dikecamatan dapat terbina dengan baik	Rp.30.331.942	Rp.22.781.942	75,1 1
24	Terpenuhinya keperluan untuk pengerjaan RENSTRA	Rp.15.000.000	Rp.15.000.000	100
25	Terlaksananya penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	Rp.5.255.600.00 0	Rp.1.614.735. 000	30,7 2
	Jumlah	Rp.13.648.265. 233	Rp.8.064.975. 813	59,8 6
	Total Belanja Langsung	Rp.7.852.725.1 74	Rp.3.679.698. 550	46.8 6

Sumber : Kantor Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 2019

Berdasarkan tabel 4.2. diketahui anggaran realisasi belanja persasaran strategis tahun 2019, sebesar Rp. 7.852.725.174, dan di realisasi sebesar Rp. 3.679.698.550 yang terdiri dari 15 sasaran strategis dari besarnya anggaran belanja langsung. Sasaran strategisnya sebagai berikut :

1. Terpenuhinya barang-barang kebutuhan pengiriman surat dinas, diketahui anggarannya Rp.4.950.000, realisasinya Rp. 4.248.000 atau 85,82% dan interprestasinya tinggi.
2. Terpenuhinya kebutuhan komunikasi penyediaan air bersih/penerangan, diketahui anggarannya Rp. 90.000.000 realisasinya Rp. 75.575.751 atau 83,97% dan interprestasinya tinggi.

3. Terlaksananya penata usahaan keuangan kecamatan dengan baik, diketahui anggaranya Rp. 335.400.000 realisasinya Rp. 238.350.000 atau 71,06% dan interprestasinya sedang.
4. Tersediannya alat kebersihan dan bahan pembersih, diketahui anggarannya Rp. 22.247.846 realisasinya Rp. 18.051.084 atau 81,14 dan interprestasinya tinggi.
5. Berfungsinya peralatan kantor untuk melaksanakan aktifitas pelayanan, diketahui anggaranya Rp. 11.025.000 realisasinya Rp. 9.500.000 atau 86,17% dan interprestasinya tinggi.
6. Terpenuhinya ATK sesuai dengan kebutuhan, diketahui anggarannya Rp. 107.113.711 realisasinya Rp. 107.113.711 atau 100% dan interprestasinya sangat tinggi.
7. Terpenuhinya barang cetak dan pengadaan, diketahui anggarannya Rp. 31.180.815 realisasinya Rp. 25.25.453.030 atau 81,63% dan interprestasinya tinggi.
8. Terpenuhinya kebutuhan komponen alat listrik, diketahui anggaranya Rp. 7.645.000 realisasinya Rp. 5.288.000 atau 69,17% dan interprestasinya sedang.
9. Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, diketahui anggarannya Rp. 20.977.900 realisasinya Rp. 20.977.900 atau 100% dan interprestasinya sangat tinggi.
10. Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan, diketahui anggarannya Rp. 3.840.000 relisasinya 3.840.000 atau 100% dan interprestasinya sangat tinggi.
11. Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor, diketahui anggaranya Rp. 14.460.000 realisasinya Rp. 11.532.000 atau 79,75% dan interprestasinya tinggi.
12. Tersediannya makanan dan minuman kantor kegiatan rapat dan tamu, diketahui anggarannya Rp. 80.290.000 realisasinya Rp. 59.522.000 atau 74,14% dan interprestasinya sedang.
13. Terlaksananya perjalanan dinas diluar daerah, diketahui anggarannya Rp. 119.750.000 realisasinya Rp. 109.865.900 atau 91,75% dan interprestasinya sangat tinggi.
14. Tersediannya tenaga kontrak, diketahui anggaranya Rp. 430.817.900 realisasinya Rp.430.803.232 atau 100% dan interprestasinya sangat tinggi.
15. Terlaksananya perjalanan dinas didalam daerah, diketahui anggarannya Rp. 166.208.000 realisasinya Rp. 151.664.000 atau 91,25% dan interprestasinya sangat tinggi.
16. Meja dan kursi untuk kelancaran tugas pada kantor kecamatan kapuas , diketahui anggranya Rp. 63.090.000 realisasinya Rp. 63.090.000 atau 100% dan interprestasinya sanggat tinggi.
17. Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, diketahui anggarannya Rp. 155.350.000 realisasinya Rp. 99.925.000 atau 64,32% dan interprestasinya rendah.
18. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, diketahui anggaranya Rp. 29.900.000 realisasinya Rp. 29.048.000 atau 97,08% dan interprestasinya sangat tinggi.

19. Tersediannya pegawai yang terampil dibidang kerjanya, diketahui anggarannya Rp.18.000.000 realisasinya 17.970.700 atau 99,84% dan interprestasinya sangat tinggi.
20. Terpenuhinya pelayanan administrasi kepada masyarakat, diketahui anggarannya Rp. 29.900.000 realisasinya Rp. 28.050.000 atau 93,81% dan interprestasinya sangat tinggi.
21. Masyarakat dikecamatan dapat terbina dengan baik, diketahui anggarannya Rp. 757.525.060 realisasinya Rp. 472.090.000 atau 62,31% dan interprestasinya rendah.
22. Terwujudnya pengelola keuangan desa dengan baik, diketahui anggarannya Rp. 52.100.000 realisasinya Rp. 45.300.000 atau 86,95% dan interprestasinya tinggi.
23. Masyarakat dikecamatan dapat terbina dengan baik, diketahui anggarannya Rp. 30.331.942 realisasinya Rp. 22.781,942 atau 75,11% dan interprestasinya sedang.
24. Terpenuhinya keperluan untuk pengerjaan RENSTRA, diketahui anggarannya Rp. 15.000.000 realisasinya Rp. 15.000.000 atau 100% dan interprestasinya sangat tinggi.
25. Terlaksananya penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan, diketahui anggarannya Rp. 5.255.600.000 realisasinya Rp. 1.614.735.000 atau 59,86% dan interprestasinya sangat rendah.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi belanja per sasaran strategis tahun 2019 yang terdiri dari 25 sasaran memiliki interprestasi yang berbeda yang hasilnya 11 sasaran strategis yang interprestasi keberhasilan anggaran dan realisasinya dikatakan sangat baik, 7 sasaran strategis yang interprestasi keberhasilan anggaran dan realisasinya baik, 4 sasaran strategis interprestasi keberhasilannya sedang, 2 sasaran strategis interprestasinya rendah, dan 1 sasaran strategis yang interprestasinya sangat rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran strategisnya berjalan baik dengan kriteria sedang.

2) Capaian Indikator Kinerja Fisik

Tabel 4.3 Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Kecamatan Kapuas Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targe t	Realisasi	Capaian (%)
			a	B	b/a*100 %
1	Terwujudnya Pelayanan	Persentase tingkat respon terhadap surat-surat yang masuk di Kecamatan	100%	95%	95%

	Administrasi				
		Jumlah dokumen perencanaan kerja tahunan kecamatan	1 Dok	1 Dok	100%
		Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu)	100%	100%	100%
		Persentase serapan Anggaran	100%	59,09%	59,09%
		Jumlah laporan tahunan Kecamatan	2 Lap	2 Lap	100%
		Persentase laporan berkala kependudukan	100%	100%	100%
		Persentase penduduk yang telah memiliki KK	100%	91,98%	91,98%
		Persentase penduduk yang telah memiliki KTP-E	100%	93,18%	193,18
		Jumlah dokumen pengeluaran surat keterangan pindah/datang	200 Dok	588 Dok	294%
		Jumlah pengeluaran surat legalisir dokumen kependudukan	200 Dok	-	-
		Persentase penerimaan PBB	100%	100%	100%
		Persentase volume sampah yang terangkat ke TPA	100%	80%	80%
		Jumlah bangunan lama yang memiliki IMB	10 IMB	21 IMB	210%
		Jumlah tempat usaha yang memiliki izin usaha	200 usaha	236 usaha	118%
		Rata-rata capaian kinerja	*)		
2	Terwujudnya peningkatan	Jumlah ketidakhadiran aparatur memenuhi jam kerja	5 hari	0 hari	0 hari

	pembinaan dan persentase kelompok masyarakat dalam membangun desa	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat/Bintek	4 orang	4 orang	100%
		Rata-rata capaian kinerja	*)		
3	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan persentase kelompok masyarakat dalam membangun desa.	Persentase posyandu aktif	100%	90%	90%
		Persentase PAUD aktif	100%	100%	100%
		Persentase PKK aktif	100%	80%	80%
		Persentase Dasawisma aktif	100%	80%	80%
		Persentase akseptor aktif	100%	74,1%	74,1%
		Persentase karang taruna aktif	100%	70%	70%
		Persentase PMR aktif	100%	80%	80%
		Persentase kelompok paskibra aktif	100%	100%	100%
		Persentase sanggar seni dan budaya aktif	100%	100%	100%
		Persentase club olahraga aktif	100%	80%	80%
		Persentase Gudep pramuka aktif	100%	80%	80%
		Rata-rata capaian kinerja	*)		
4	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan, pembangunan ketentraman dan	Persentase proposal hibah yang disetujui	100%	80%	80%
		Persentase penduduk miskin yang menerima beras raskin	100%	100%	100%
		Persentase kelompok tani yang menerima pupuk subsidi	100%	90%	90%
		Jumlah usaha mikro (PKL) aktif	35 usaha	14 usaha	85,71%

	ketertiban masyarakat	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%
		Persentase surat teguran pelanggaran perda yang ditindaklanjuti pelanggar	100%	100%	100%
		Jumlah anggota linmas aktif	260 orang	200 orang	77%
		Persentase kelompok siskamling aktif	26 Desa / Kel	20 Desa / Kel	76,92%
		Persentase ormas/LSM/yayasan aktif	1005	90%	90%
		Rata-rata capaian kinerja	*)		
5	Terwujudnya peningkatan pembangunan Desa	Persentase serapan anggaran Desa	100%	92%	92%
		Persentase serapan anggaran pembangunan Desa	100%	91,3%	91.3%
		Persentase pelaksanaan Musrembang Desa	100%	100%	100%
		Rata-rata capaian kinerja	*)		
		Rata-rata keseluruhan	**)		

Sumber : Kantor Kecamatan Kapuas Tahun 2019

*) Rata-rata capaian dihitung dari jumlah capaian dibagi jumlah indikator.

**) Rata-rata keseluruhan dihitung dari jumlah rata-rata capaian kinerja dibagi jumlah sasaran strategis.

Berdasarkan tabel 4.I capaian indikator kinerja pemerintah daerah Kecamatan Kapuas tahun 2019 terdiri dari 5 sasaran strategis dan 39 indikator kinerja, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis terwujudnya pelayanan administrasi
 - a. Presentase tingkat respon terhadap surat-surat yang masuk di Kecamatan, target 100% realisasi 95% dan capaiannya 95%.
 - b. Jumlah dokumen perencanaan kerja tahunan Kecamatan target 1 Dok realisasi 1 Dok dan capaiannya 100%.
 - c. Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu), target 100% realisasi 100% dan capaiannya 100%
 - d. Persentase serapan anggaran, target 100% realisasi 59,09% dan capaiannya 59,09%

- e. Jumlah laporan tahunan Kecamatan, target 2 Lap realisasi 2 Lap dan capaiannya 100%
 - f. Presentase laporan berkala kependudukan, target 100% realisasi 100% dan capaiannya 100%
 - g. Presentase penduduk yang telah memiliki KK, target 100% realisasi 91,98% dan capaiannya 91,98%
 - h. Presentase penduduk yang telah memiliki KTP-E, target 100% realisasi 93,18% dan capaiannya 93,18%
 - i. Jumlah dokumen pengeluaran surat keterangan pindah/datang, target 200 Dok realisasi 588 Dok dan capaiannya 294%
 - j. Jumlah pengeluaran surat legalisir dokumen kependudukan, target 200 Dok
 - k. Presentase penerimaan PBB, target 100% realisasi 100% dan capaiannya 100%
 - l. Presentase volume sampah yang terangkat ke TPA, target 100% realisasi 80% dan capaiannya 80%
 - m. Jumlah bangunan lama yang memiliki IMB, target 10 IMB realisasi 21 MB dan capaiannya 210%
 - n. Jumlah tempat usaha yang memiliki izin usaha, target 200 usaha realisasi 236 usaha dan capaiannya 118%
2. Sasaran strategis terwujudnya peningkatan pembinaan dan presentase kelompok masyarakat dalam membangun Desa
- a. Jumlah ketidakhadiran aparatur memenuhi jam kerja, target 5 hari realisasi 0 hari dan capaiannya 0 hari
 - b. Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat/Bintek, target 4 orang realisasi 4 orang dan capaiannya 100%
3. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan presentase kelompok masyarakat dalam membangun desa
- a. Presentase posyandu, target 100% realisasi 90% dan capaiannya 90%
 - b. Presentase posyandu, target 100% realisasi 100% dan capaiannya 100%
 - c. Presentase PKK aktif, target 100% realisasi 80% dan capaiannya 80%
 - d. Presentase Dasawisma aktif, target 100% realisasi 80% dan capaiannya 80%
 - e. Presentase ekseptor aktif, target 100% realisasi 74,1% dan capaiannya 74,1%
 - f. Presentase karang taruna aktif, target 100% realisasi 70% dan capaiannya 70%
 - g. Presentase PMR aktif, target 100% realisasi 80% dan capaiannya 80%
 - h. Presentase kelompok paskipra aktif, target 100% realisasi 100% dan capaiannya 100%
 - i. Presentase sanggar seni dan budaya aktif, target 100% realisasi 100% dan capaiannya 100%
 - j. Presentase club olahraga aktif, target 100% realisasi 80% dan capaiannya 80%
 - k. Presentase gudep pramuka aktif, target 100% realisasi 80% dan capaiannya 80%
4. Sasaran strategis terwujudnya peningkatan kesejahteraan, pembangunan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- a. Presentase proposal hibah yang disetujui, target 100% realisasi 80% dan capaiannya 80%
 - b. Presentase penduduk miskin yang menerima beras raskin, target 100% realisasi 100% dan capaiannya 100%
 - c. Presentase kelompok tani yang menerima pupuk subsidi, target 100% realisasi 90% dan capaiannya 90%
 - d. Jumlah usaha mikro (PKL) aktif, target 35 usaha realisasi 14 usaha dan capaiannya 85,71%
 - e. Presentase swadaya masyarakat dalam pembangunan, target 1005 realisasi 100% dan capaiannya 100%
 - f. Presentase surat teguran pelanggaran perda yang ditindaklanjuti pelanggar, target 100% realisasi 100% dan capaiannya 100%
 - g. Jumlah anggota linmas aktif, target 26 Desa/Kel realisasi 20 Desa/kel dan capaiannya 76,92%
 - h. Presentase ormas/LSM/Yayasan aktif, target 100% realisasi 90% dan capaiannya 90%
5. Sasaran strategis terwujudnya peningkatan pembanguna Desa
- a. Presentase serapan anggaran Desa, tarhet 100% realisasi 92% dan capaiannya 92%
 - b. Presentase serapan anggaran pembangunan Desa, target 100% realisasi 91,31% dan capaiannya 100%
 - c. Prenesntasi pelaksanaan Musrembang Desa, target 100% realisai 100% dan capaiannya 100%.

Jadi, berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja fisik, dapat dicapai dengan baik dilihat dari realisasi yang melebihi rata-rata target capaian.

3) Realisasi pencapaian kinerja keuangan SKPD

Realisasi belanja (Non Belanja Pegawai) Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau sebesar Rp.3.679.698.550,00 atau 46,86% dari anggaran sebesar Rp.7.852.725.174,00 Belanja langsung pada SKPD Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dilaksanakan dengan 8 Program dan 25 Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 4.4 KRITERIA PENILAIAN KINERJA TAHUN 2019

No	Jumlah Capaian Kinerja %	Interprestasi
1	≥ 91	Sangat Tinggi
2	$\geq 76 - 90,99$	Tinggi
3	$\geq 66 - 75,99$	Sedang
4	$\geq 51 - 65,99$	Rendah
5	$\leq 50,99$	Sangat Rendah

Sumber : Kantor Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 2019

Tabel 4.5 Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD Tahun 2019

N o	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Indikator
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.1.445.906.172	Rp.1.271.787.608	87,96	Tinggi
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp.4.950.000	Rp.4.248.000	85,82	Tinggi
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Rp.90.000.000	Rp.75.575.751	83,97	Tinggi
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp.335.400.000	Rp.238.350.000	71,06	Sedang
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp.22.247.846	Rp.18.051.084	81,14	Tinggi
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp.11.025.000	Rp.9.500.000	86,17	Tinggi
6	Penyediaan alat tulis kantor	Rp.107.113.711	Rp.107.113.711	100	Sangat tinggi
7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Rp.31.180.815	Rp.25.453.030	81,63	Tinggi
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp.7.645.000	Rp.5.288.000	69,17	Sedang
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.20.977.900	Rp.20.977.000	100	Sangat tinggi
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.3.840.000	Rp.3.480.000	100	Sangat tinggi

11	Penyediaan bahan logistic kantor	Rp.14.460.000	Rp.11.532.000	79,75	Tinggi
12	Penyediaan makanan dan minuman	Rp.80.290.000	Rp.59.525.000	74,14	Sedang
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp.119.750.000	Rp.109.865.900	91,75	Sangat tinggi

14	Penyediaan jasa tenaga kerja non PNS	Rp.430.817.000	Rp.430.803.232	100	Sangat tinggi
15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp.166.208.000	Rp.151.664.000	91,25	Sangat tinggi
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.248.362.000	Rp.192.063.500	77,33	Tinggi
1	Pengadaan mebel	Rp.63.090.000	Rp.63.090.000	100	Sangat tinggi
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp.155.350.000	Rp.99.925.000	64,32	Rendah
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp.29.922.000	Rp.29.048.000	97,08	Sangat tinggi
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.18.000.000	Rp.17.970.700	99,84	Sangat tinggi
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp.18.000.000	Rp.17.970.700	99,84	Sangat tinggi

(Nur Adhitya Ningsih)

D	Program Pelayanan Prima	Rp.29.900.000	Rp.28.050.000	93,81	Sangat tinggi
1	Peningkatan pelayanan prima kecamatan (PATEN)	Rp.29.900.000	Rp.28.050.000	93,81	Sangat tinggi
E	Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp.757.525.060	Rp.472.009.800	62,31	Rendah
1	Pembinaan masyarakat di Kecamatan	Rp.757.525.060	Rp.472.009.800	62,31	Rendah
F	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp.82.431.942	Rp.68.081.942	82,59	Tinggi
1	Kegiatan fasilitas pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan Desa	Rp.52.100.000	Rp.45.300.000	86,95	Tinggi
2	Kegiatan fasilitas forum koordinasi pimpinan Kecamatan	Rp.30.331.942	Rp.22.781.942	75,11	Sedang
G	Program Penataan Organisasi, Tata Laksana, dan Peningkatan Pelayanan Publik	Rp.15.000.000	Rp.15.000.000	100	Sangat tinggi

	Perangkat Desa				
1	Penyusunan Renstra Kec. Tahun 2019-2024	Rp.15.000.000	Rp.15.000.000	100	Sangat tinggi
H	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rp.5.255.600.000	Rp.1.614.735.000	30,72	Sangat rendah
1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk (DAU Tambahan)	Rp.5.255.600.000	Rp.1.614.735.000	30,72	Sangat rendah
	Jumlah	Rp.7.852.725.174	Rp.3.679.698.550	46,86	

Sumber : Kantor Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.4 Realisasi belanja (Non Belanja Pegawai) Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau sebesar Rp.3.679.698.550,00 atau 46,86% dari anggaran sebesar Rp.7.852.725.174,00 Belanja langsung pada SKPD Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dilaksanakan dengan 8 Program dan 25 Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Kegiatan 1 : Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang diketahui anggarannya Rp. 1.445.906.172 realisasinya Rp. 1.271.787.608 atau 87,96% dan interprestasinya tinggi.
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat, diketahui anggarannya Rp. 4.950.000 realisasinya Rp. 4.248.000 atau 85,82% dan interprestasinya tinggi.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik, diketahui anggarannya Rp. 90.000.000 realisasinya Rp. 75.575.751 atau 83,97% dan interprestasinya tinggi.
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, diketahui anggarannya Rp. 335.400.000 realisasinya Rp. 238.350.000 atau 71,06% dan interprestasinya sedang.
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, diketahui anggarannya Rp.22.247.846 realisasinya Rp. 18.051.084 atau 81,14% dan interprestasinya tinggi.

- e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, diketahui anggarannya Rp. 11.025.000 realisasinya Rp. 9.500.000 atau 86,17% dan interprestasinya tinggi.
 - f) Penyediaan alat tulis kantor, diketahui anggarannya Rp. 107.113.711 realisasinya Rp. 107.113.711 atau 100% dan interprestasinya sangat tinggi.
 - g) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan, diketahui anggarannya Rp. 31.180.815 realisasinya Rp. 25.453.030 atau 81,63% dan interprestasinya tinggi.
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, diketahui anggarannya Rp. 7.645.000 realisasinya Rp. 5.288.000 atau 69,17% dan interprestasinya sedang.
 - i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, diketahui anggarannya Rp. 20.977.900 realisasinya Rp. 20.977.000 atau 100% dan interprestasinya sangat tinggi.
 - j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, diketahui anggarannya Rp. 3.840.000 realisasinya Rp. 3.480.000 atau 100% dan interprestasinya sangat tinggi.
 - k) Penyediaan bahan logistic kantor, diketahui anggarannya Rp. 14.460.000 realisasinya Rp. 11.532.000 atau 79,75% dan interprestasinya tinggi.
 - l) Penyediaan makanan dan minuman, diketahui anggarannya Rp. 80.290.000 realisasinya Rp. 59.525.000 atau 74,14% dan interprestasinya sedang.
 - m) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, diketahui anggarannya Rp. 119.750.000 realisasinya Rp. 109.865.900 atau 91,75% dan interprestasinya sangat tinggi.
 - n) Penyediaan jasa tenaga kerja non PNS, diketahui anggarannya Rp. 430.817.000 realisasinya Rp. 430.803.232 atau 100% dan interprestasinya sangat tinggi.
 - o) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, diketahui anggarannya Rp. 166.208.000 realisasinya Rp. 151.664.000 atau 91,25% dan interprestasinya sangat tinggi.
2. Program Kegiatan 2 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, diketahui anggaran Rp. 248.362.000 realisasi Rp. 192.063.500 atau 77,33% dan interprestasinya tinggi.
- a) Pengadaan mebeleur, diketahui anggarannya Rp. 63.090.000 realisasinya Rp. 63.090.000 atau 100% dan interprestasinya sangat tinggi.
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, diketahui anggarannya Rp. 155.350.000 realisasinya Rp. 99.925.000 atau 64,32% dan interprestasinya rendah.
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, diketahui anggarannya Rp. 29.922.000 realisasinya Rp. 29.048.000 atau 97,08% dan interprestasinya sangat tinggi.

3. Program Kegiatan 3 : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, diketahui anggarannya Rp. 18.000.000 realisasinya Rp. 17.970.700 atau 99,84% dan interprestasinya sangat tinggi.
 - a) Pendidikan dan pelatihan formal, diketahui anggarannya Rp. 18.000.000 realisasinya Rp.17.970.700 atau 99,84% dan interprestasinya sangat tinggi.
4. Program Kegiatan 4 : Pelayanan Prima, diketahui anggarannya Rp. 29.900.000 realisasinya Rp.28.050.000 atau 93,81% dan interprestasinya sangat tinggi.
 - a) Peningkatan pelayanan prima kecamatan (PATEN), diketahui anggarannya Rp. 29.900.000 realisasinya Rp. 28.050.000 atau 93,81% dan interprestasinya sangat tinggi.
5. Program Kegiatan 5 : Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa, diketahui anggarannya Rp. 757.525.060 realisasinya Rp. 472.009.800 atau 62,31% dan interprestasinya rendah
 - a) Pembinaan masyarakat di kecamatan, diketahui anggarannya Rp. 757.525.060 realisasinya Rp. 472.009.800 atau 62,31% dan interprestasinya rendah.
6. Program Kegiata 6 : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, diketahui anggarannya Rp. 82.431.942 realisasi Rp. 68.081.942 atau 82,59% dan interprestasinya tinggi.
 - a) Kegiatan fasilitas pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan Desa, diketahui anggarannya Rp. 52.100.000 realisasinya Rp. 45.300.000 atau 86,95% dan interprestasinya tinggi.
 - b) Kegiatan fasilitas forum koordinasi pimpinan kecamatan, diketahui anggarannya Rp. 30.331.942 realisasinya Rp. 22.781.942 atau 75,11% dan interprestasinya sedang.
7. Program Kegiatan 7 : Penataan Organisasi, Tata Laksana, dan Peningkatan Pelayanan Publik Perangkat Desa, diketahui anggarannya Rp.15.000.000 realisasinya Rp. 15.000.000 atau 100% dan interprestasinya sangat tinggi.
 - a) Penyusunan Renstra Kec. Tahun 2019-2024, diketahui anggarannya Rp. 15.000.000 realisasinya Rp. 15.000.000 atau 100% dan interprestasinya sangat tinggi.
8. Program Kegiatan 8 : Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, diketahui anggarannya Rp. 5.255.600.000 realisasinya Rp. 1.614.735.000 atau 30,72% dan interprestasinya sangat rendah.
 - a) Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan (DAU Tambahan), diketahui anggarannya Rp. 5.255.600.000 realisasinya Rp. 1.614.735.000 atau 30,72% dan interprestasinya sangat rendah.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pencapaian kinerja keuangan SKPD yang terdiri dari 8 program dan 25 kegiatan memiliki interprestasi yang berbeda, hasilnya 11 kegiatan yang interprestasi keberhasilan dikatakan sangat baik, 7 kegiatan yang interprestasi keberhasilan dikatakan baik, 4 kegiatan yang interprestasi keberhasilan dikatakan sedang, 2 kegiatan yang interprestasinya dikatakan rendah, dan 1 kegiatan yang interprestasinya dikatakan

sangat rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi pencapaian Kinerja Keuangan SKPD berjalan baik dengan kriteria sedang.

Pembahasan

Berdasarkan hasil terhadap indikator kinerja utama Kecamatan Kapuas, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disajikan oleh Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau menunjukkan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja Kecamatan Kapuas telah berjalan dengan baik dilihat dari capaian indikator dengan hasil kriteria sedang. Adapun analisis laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau sebagai berikut:

1. Perencanaan Strategi

Salah satu bagian terpenting dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau adalah adanya Rencana Strategis sebagai acuan target kinerja. Renstra Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau disusun untuk jangka waktu lima Tahun yaitu tahun 2019-2024. Rencana strategis kecamatan kapuas terdapat pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran, perjanjian kinerja, program dan kegiatan pokok. Rencana strategis kecamatan kapuas tidak berbentuk dokumen yang utuh dan tidak terdapat gambar. Selain itu, tidak dijelaskan mengenai hubungan satu persatu antara ukuran kinerja dengan program dan kegiatan. Sehingga banyak program dan kegiatan yang tidak ada hubungan dengan ukuran kinerja dan sebaliknya banyak ukuran kinerja yang tidak jelas program dan kegiatannya. Perencanaan strategi kecamatan kapuas mengacu pada RPJMD daerah, RPJMD Provinsi, dan RPMJ Pusat.

Hasilnya yaitu dilihat dari realisasi pencapaian kinerja keuangan yang terdiri dari 8 program kinerja dan 25 indikator kegiatan yang persentasenya yaitu 11 indikator kriteria sangat tinggi, 7 indikator kriteria tinggi, 4 indikator kriteria sedang, 2 indikator kriteria rendah, dan 1 indikator kriteria sangat rendah. Sehingga pengukuran terhadap seluruh indikator kinerja di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada Kecamatan Kapuas dikategorikan berjalan dengan baik dan mencapai kriteria sedang.

2. Program kerja

Program kerja tahunan yang mengacu pada rencana strategi dan rencana kerja pemerintah. Saat ini kecamatan kapuas telah memiliki dokumen program kerja tahun 2019 yang berisi capaian kinerja, uraian kegiatan. Pada program kerja kecamatan kapuas membuat daftar program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2019, namun tidak jelas perbedaan makna penggunaan antara program dan kegiatan, Sehingga banyak kegiatan utama yang menggunakan kata program. contohnya seperti program pembangunan infrastruktur perdesaan atau prasarana fisik kelurahan, yang diketahui bahwa anggaran tidak terealisasi dengan baik sehingga membuat Kegiatan-kegiatan tersebut dituliskan tidak dikelompokkan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, perjanjian kinerja, dan program dan kegiatan. Hal ini mengakibatkan terjadi ketidakjelasan antara program dan kegiatan dengan capaian hasil yang ingin dicapai. Untuk itu perlu adanya penjelasan uraian dari program kerja yang perlu dicapai berdasarkan visi dan misi pemerintah Kapuas Kabupaten Sanggau agar dapat menjelaskan sasaran dan tujuan dari program yang

dicapai.

3. Pengukuran Kinerja

Menurut Mahmudi dkk (2013) Pengukuran kinerja merupakan suatu alat atau metode yang digunakan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga kemajuan suatu organisasi dapat diketahui serta dapat meningkatkan kualitas dan pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Kapuas melalui tiga syarat yaitu : (1) SPJ Fungsional, (2) RFK-0 dan (3) Laporan Realisasi fisik dan keuangan yang hasilnya dapat disimpulkan bahwa pengukuran yang disampaikan oleh Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau sudah berjalan dengan baik walaupun ada satu bidang yang belum bisa daam memenuhi target untuk dicapai.

4. Pelaporan dan evaluasi Kinerja

Pada pedoman penyusunan dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi ditulis bahwa pelaporan kinerja yang digunakan dalam sektor publik di Indonesia adalah LAKIP. LAKIP dipakai sebagai media akuntabilitas bagi isntansi pemerintah. Pelaporan dan evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau disajikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun dan dilaporkan secara periodik. Jadi pelaporan kinerja yang dibuat oleh Kantor Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau telah melaksanakan kewajiban pelaporan kinerjanya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada dan digunakan dalam mencapai tujuan suatu instansi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 8 program dan 25 indikator kegiatan yang dilihat dari laporan realisasi pencapaian kinerja keuangan dicapai dengan interprestasi yang berbeda-beda, yaitu 11 indikator interprestasinya dicapai dengan sangat tinggi, 7 indikator interprestasinya dicapai dengan tinggi, 4 indikator interprestasinya dicapai dengan sedang, 2 indikator interprestasinya rendah, dan 1 indikator interprestasi sangat rendah.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja dikatakan berjalan dengan baik dan mencapai kriteria sedang. Walaupun masih terdapat kendala, atau hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun hambatannya sebagai berikut keterbatasan sarana dan prasarana baik dari segi sumber daya manusia maupun dari segi alat atau sistem yang memungkinkan untuk diperbaiki pada masa mendatang. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga diperoleh hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Beby Nurtesha Putri. Nurtesha. Beby. 2019. *Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu*

- Raya. Jurnal Akuntansi Maranatha Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha. ISSN 2085-8698.
- Hadiyanti. Aulia. Padla. 2017. *Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Pariwisata Seni Budaya Kabupaten OKU Timur*. Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.
- Intruksi Presiden No 7, 1999. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga. Jogjakarta.
- Keputusan Camat Kapuas 06, 2019. *Tentang Rencana Strategis Kecamatan Kapuas*.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja. 2019. Kecamatan Kapuas Kab. Sanggau.
- Mahsun, Mohamad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama*. BPFE. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2007. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua*. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54, 2010. *Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8, 2008. Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.
- Peraturan Presiden No. 29, 2014. *Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara*.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24, 2015. *Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau*.
- Peraturan Bupati Sanggau No 24, 2015. *Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau*.
- Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kapuas, 2019-2024, Ditetapkan Melalui Kaputusan Camat Kapuas, No 06.
- Reformasi Birokrasi No. 53, 2014 *Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riview Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Renyowijjiyo, Muindro. 2003. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Penertbit. Alfabeta. Bandung.
- Santoso, Susan. 2013. *Analisis Laporan Akuntabilitas Kmerja pada Dinas Kebudayaan dan pariwisata provinsi Sulawesi Utara*. Manado. Program Studi Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, ISSN 2303-1174.
- Widiyastuti. Titik. 2018. *Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wulansuci. Saras. Perpetua. 2017. *Analisi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 (Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman)*. Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.